BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam menumbuhkan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat peraturan yang harus di taati oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Harapannya agar pendapatan yang didapat dari penghasilan daerah tersebut dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip dari otonom yang nyata. Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan undang-undang No.12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah pembangunan ekonomi daerah terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terluas yang ada di Asia Tenggara, selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yang berbeda-beda. Indonesia juga dibagi menjadi 34 Provinsi mulai dari Sabang sampai Marauke atau dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua. Dengan begitu banyaknya daerah yang ada diindonesia tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan yang ada pasti berbeda, melihat sumberdaya yang dimiliki sangat melimpah dan berbeda-beda pula disetiap wilayahnya. Ada wilayah yang cepat pertumbuhannya ada juga yang lambat.

Seperti yang telah kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar serta dibagi menjadi 34 provinsi yang ada. Akan sangat tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja. Maka dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya pemerintaha di Indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi.

Dengan adanya otomi daerah, maka setiap daerah yang ada di Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasar pada Pancasila. Walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan Indonesia tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota.

Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1 dan 2. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Suatu daereah dapat dinyatakan berhasil dalam pengelolaan potensi daerahnya dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Halacmi (2005) dalam darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu cara bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan cara melakukan pengukuran kerja. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membangun dan melayani masyarakat. Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Analisa rasio keuangan terhadap APBD dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaran otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pemebangunan dan pelayan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang

diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pendapatan daerah (Aula, 2013)

Pada setiap tahunnya pemerintah daerah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa untuk mendapatkan opini dari BPK RI. LKPD BPK RI tersebut dapat dianalisis untuk melihat tingkat kemandirian daerah khususnya daerah Provinsi Lampung, yaitu melihat seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan mendanai segala keperluan daerah tersebut. Tugas penting yang dilakukan pemerintah daerah adalah bagaimana caranya membangkitkan potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebagai dana (Pendapatan Asli Derah) untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada dalam pe,erintahan tersebut. PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah sebagai modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan belanja daerah. PAD adalah pendapatan asli yang berasal dari daerah itu sendiri. Sehingga dari PAD tersebut dapat dilihat seberapa besar kemandirian daerah itu dalam membiayai dan membangun daerahnya. Salah satu pengaruh lain berdasarkan LKPD BPK RI adalah *earning performance,* yakni rasio tingka pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunkan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan (Prasetya, 2005,)

Earning performance jika dilihat dari pajak dan retribusi merupakan penyumbang terbesar yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika semakin besar penghasilan pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh daerah kabupaten/kota tersebut diharapkan menjadi salah satu penerimaan daerah dalam peningkatan kemandirian daerah tersebut. Dimana pajak ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sedangkan retribusi yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajkan dan retribusi daerah. Hal tersebut merupakan sesuai dari isi Undang-undang No.34 tahun 2000 yaitu tentang pajak dan retribusi daerah.

Pulau sumatra merupakan pulau terbesar ketiga di indonesia dan memiliki 10 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Luas wilayah dan penduduk setiap provinsi pun berbeda. Sehingga seluruh pemerintah daerah yang ada di pulau sumatra diberi kewenangan untuk mengatur dan menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah masing-masing supaya nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri untuk membiyai rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam undang-undang. Fenomena yang dilihat saat ini adalah banyaknya pemerintah daerah yang kurang dalam mengelola potensi daerah baik dalam pariwisata, kebudayaan dan kekayaan alam lainnya, sehingga mempengaruhi dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum daerah tersebut. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu Waksito Hadi (2017) yang berjudul Pengaruh *Earning Perfomance* Dan Proporsi PAD LKPD 2015 Terhadap Kemandirian Daerah Dijawa Tengah 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya atau studi empirisnya untuk penelitian sebelumnya didaerah jawa barat sedangkan penelitian ini seluruh kabupaten/kota sesumatera. Serta penambahan variabel Dana Alokasi Umum. Penambahan variabel ini guna untuk menemukan hasil yang baru dan memperluas dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel tersebut terhadap kemandirian daerah, maka peneliti akan menjelaskan dalam penelitian yang berjudul :

"PENGARUH *EARNING PERFORMANCE*, PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH"

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah melibatkan seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota Se Sumatera yang mana untuk datanya mengambil yang sudah ada di website resmi setiap Kabupaten/Kota Se Sumatera dan akan diolah untuk menentukan pengaruh dari variabel tersebut terhadap Kemandirian Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalh sebagai berikut :

1. Apakah *Earning Performance* berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah Se Sumatera?
2. Apakah Proporsi PAD berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah Se Sumatera?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah Se Sumatera?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Earning Performance* terhadap Kemandirian Daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Proporsi PAD terhadap Kemandirian Daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik.

a. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang yang berkaitan dengan Kemandirian Daerah.

2. Manfaat Praktis

Merupakan manfaat secara langsung dari penelitian yang dapat digunakan oleh oranglain maupun masyarakat.

a. Bagi Peneliti

   Meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti tentang berapa Pendapatan Asli Daerah yang ada di Se-sumatera serta darimana saja pendapatan tersebut didapat.

b. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi untuk melihat bagaimana perbandingan pendapatan dan opini yang didapat selama lima tahun.

c. Bagi Mahasiswa

   Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan dikembang kan lagi oleh mahasiswa dalam penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, ruanglingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Kemandirian Daerah, *Earning Performance,* Proporsi PAD, penelitian terdahulu kerangka pemikiran, serta bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sumber data, menguraikan variabel-variabel penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan analisisnsecara menyeluruhndari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil-hasil statistic dan pembahasan di kaji secara mendalam hingga mencapai hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan secara singkat mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN